

**GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
JALAN LINGKAR UTARA KOTA SOLOK OLEH PEMERINTAH  
DAERAH KOTA SOLOK**

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



**Frenadin Adegustara, SH.,MS**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
JALAN LINGKAR UTARA KOTA SOLOK OLEH PEMERINTAH  
DAERAH KOTA SOLOK

Oleh : WeriZakia  
ABSTRAK

Kegiatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin menghadapi tantangan terutama aspek penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan tersebut. Hal ini dipahami karena ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah terbatas luas dan bidangnya. Bidang-bidang tanah relatif sudah terbagi habis penguasanya. Padahal kegiatan pembangunan terutama untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah. Jalan Lingkar utara termasuk kedalam kategori jalan arteri yang menghubungkan Kota Solok dengan Kabupaten Solok Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 1) Bagaimanakah proses penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok oleh Pemerintah Daerah Kota Solok? 2) Bagaimanakah penyerahan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok oleh Pemerintah Daerah Kota Solok? 3) Bagaimanakah penyelesaian sisa pengadaan tanah jalan lingkar utara yang belum selesai termasuk pembayaran penggantian kerugian? Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menekankan pada aspek-aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas, sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan *juridis empiris*. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Utara Kota Solok secara langsung antara Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok dengan pemilik tanah atau kuasanya dengan cara pelepasan hak atas tanah, bangunan dan benda-benda yang terkait dengannya dengan prinsip musyawarah. hal tersebut telah sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012. Dalam Penetapan Ganti Kerugian dilakukan dengan cara musyawarah antara Instansi Pemerintah melalui Tim Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dan kuasanya berdasarkan hasil penilaian dari tim appraisal, dasar penilaian yang digunakan adalah nilai pengganti wajar (Fair replacement Value) dan penggantian yang layak dan adil, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kata kunci : Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan.

*CHANGE OF LOSS OF LAND PROCUREMENT FOR DEVELOPMENT OF  
LINGKAR UTARA KOTA SOLOK ROAD BY THE GOVERNMENT  
AREA OF SOLOK CITY*

*By: WeriZakia*

*ABSTRACT*

*Development activities from time to time increasingly face challenges, especially aspects of the provision of land for the benefit of the development. This is understood because the availability of land controlled by the government is limited in area and area. The land parcels are relatively divided. Even though development activities, especially for the public interest, require land acquisition. The North Ring Road is included in the category of arterial roads that connect Solok City with Solok District, Padang City, Padang Panjang City, Tanah Datar District and Sawah Lunto / Sijunjung Regency. This study aims to find out about: 1) What is the form and process of compensation for land acquisition for the construction of the Solok City northern ring road by the Solok City Regional Government? 2) What is the process of submitting compensation for land acquisition for the construction of the Solok City northern ring road by the Solok City Regional Government? 3) What is the process of completing the remaining land acquisition for the unfinished northern ring road including compensation?, The main approach method used in this study is a normative juridical approach, namely research that emphasizes legal aspects, by studying primary legal and secondary law materials which will later be used as guidelines in understanding and analyzing the issues discussed, while supporting the main approach empirical juridical approach is used, The results showed that the Implementation of Land Acquisition for the Solok City North Ring Road was directly between the Solok City Government Agency and the landowners or their proxies by releasing rights to land, buildings and objects associated with it under the principle of deliberation. This is in accordance with Article 10 of the Republic of Indonesia Law Number 2 Year 2012 jo Presidential Regulation Number 71 of 2012. In the determination of compensation carried out by means of deliberations between Government Agencies through the Land Procurement Team with Landowners and their proxies based on the assessment results from the team appraisal, the basis of the assessment used is the fair replacement value and fair and fair replacement, this is in accordance with Article 10 of the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2012 concerning the procurement of land for development in the public interest and the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2012 concerning the Implementation of Land Procurement for development in the public interest.*

*Keywords: Damage, Land, Road Construction.*